

Perizinan Satu Kanal Perlu Terus Dibenahi

Provinsi Jateng mencatatkan nilai rencana investasi Rp 76,4 triliun dan 810,9 juta dolar AS dalam Central Java Investment Business Forum (CJIBF) di Jakarta, akhir November lalu. Hingga triwulan III-2018, investasi yang masuk sudah mencapai Rp 41,94 triliun dari target tahun ini Rp 47,15 triliun.

Sejauh mana pemerintah, asosiasi usaha, dan pelaku bisnis melihat peluang berusaha serta hambatan yang dialami terkait dengan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di provinsi serta kabupaten dan kota?

UPAYA pemerintah kembali menata sektor perizinan dan menyederhanakan prosedur sekaligus melayani permohonan perizinan lewat satu kanal terintegrasi sistem *Online Single Submission* (OSS) patut diapresiasi. Meski program tersebut diharapkan bisa mendorong minat investasi yang masuk, dalam pelaksanaannya masih banyak kendala dan hingga saat ini penyempurnaan terus dilakukan.

Calon investor yang hendak masuk atau yang sudah berusaha di Jateng sebenarnya hanya membutuhkan kepastian dalam berbagai aspek. Aturan yang seringkali tumpang tindih antara pusat, provinsi, dan daerah; belum lagi kepastian kapan infrastruktur untuk mendukung investasi akan selesai dikerjakan, menjadi beberapa hal yang seing dikeluhkan.

Anggota Himpunan Kawasan Industri (HKI) Jateng Setyo Adi Paminto mengaku sistem baru OSS dengan penyempurnaan yang terus dilakukan sering menjadi kendala. Sejumlah ketentuan yang berubah-ubah harus dikomunikasikan dengan investor atau calon investor yang sedang melakukan peninjauan.

Pilihan ke kawasan industri, terutama yang sudah memiliki fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) dilakukan



SM/Modesta fiska
Dedi Mulyadi Ali

investor, khususnya penanaman modal asing (PMA) yang ingin proyeknya bisa segera berjalan. Dengan fasilitas KLIK, investor bisa langsung membangun proyek setelah memperoleh izin investasi atau izin prinsip baik di pusat maupun daerah.

"Kami berharap aturan yang tumpang tindih dikomunikasikan dengan baik, termasuk OSS, karena aturannya berubah-ubah. Meski demikian, kami memaklumi karena sistem baru pasti butuh penyesuaian," ujar Adi, Corporate Secretary Jatengland Industrial Park Sayung, Demak, kemarin,

Investor tentu bertanya, benefit atau keuntungan apa yang akan didapat ketika mereka memulai usahanya di wilayah ini. Ganjalan soal infrastruktur dan kondisi jalan rusak serta banjir di Kaligawe, misalnya, membuat mereka berpikir ulang.

"Kepastian itu juga tentang percepatan infrastruktur. Coba, dari bandara menuju Demak diadang banjir di Kaligawe, kami mau bagaimana lagi. Soal izin bisa lebih terintegrasi, tetapi kalau infrastrukturnya tidak pasti kapan

selesai, tentu berdampak pada calon investor yang mau masuk Jateng," imbuh dia.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng Dedi Mulyadi Ali menilai penyempurnaan komunikasi antara pemerintah baik pusat maupun provinsi dan kabupaten serta kota perlu lebih intensif lagi.

Hal itu untuk mendorong optimalisasi penerapan OSS di daerah yang satu sama lain memiliki keterbatasan jaringan serta sumber daya manusia (SDM). Sangat disayangkan jika investasi ke Jateng yang dinilai makin seksi tidak diikuti dengan pembenahan sistem untuk mendorong investor masuk.

"Seharusnya, OSS mempermudah, tetapi ada keterbatasan di setiap daerah. Tapi kami cukup mengapresiasi karena respon dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPPTSP) Jateng

cepat dan melakukan jemput bola untuk membenahi yang masih kurang dalam prosesnya," ungkap Ketua Apindo Kota Semarang itu.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Semarang Arnaz Agung Andrarasmara



SM/Modesta fiska
Arnaz A Andrarasmara

menambahkan daerah, Kota Semarang misalnya, dari sisi tata kelola masih menunjukkan kegiatan pelayanan perizinan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku. Sistem informasi elektronik yang dimiliki belum terintegrasi dengan organisasi perangkat daerah teknis.



SM/Modesta fiska
Setyo Adi Paminto

"Tapi kami mengapresiasi bagaimana dinas bertindak cepat menerima keluhan, contohnya sistem *down* sehingga memerlukan pendampingan, sudah ditangani secara baik. Jadi, walau ada kendala pada OSS yang masih belum sempurna, masih ada sistem lokal agar izin bisa

keluar cepat," ujar pengusaha yang bergerak di bidang konstruksi, kuliner, dan investasi itu.

Kepala DPMPPTSP Jateng Prasetyo Aribowo menyebutkan pendampingan dan jemput bola terus dilakukan hingga ke daerah, khususnya bagi para pelaku usaha yang masih belum bisa mengakses sistem OSS, atau sudah teregistrasi namun ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi karena penyempurnaan sistem.

Investasi yang dijarah dalam CJIBF 2018, dari target 69 kepemilikan tercapai 87 dari berbagai sektor. Sejumlah kendala yang dihadapi di antaranya dalam hal mengemas proyek investasi kewenangan kabupaten dan kota yang belum dapat diidentifikasi secara jelas apakah termasuk proyek yang siap ditawarkan, prospektif atau potensial. Kendati demikian, Pemprov kali ini selektif dalam memasukkan proyek-proyek yang memang sudah siap ditawarkan dalam buku profil investasi kepada para calon investor.

Berdasarkan data terakhir, Kabupaten Jepara, Batang, Brebes, Kendal, dan Sukoharjo menempati lima besar pencapaian investasi PMA, sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencakup Kota Semarang, Kabupaten Cilacap, Sragen, Sukoharjo, dan Pekalongan. (Modesta Fiska-18)